

KRITIK PEMBANGUNAN DESA DARI LUAR: DESA DAN PROYEK PERTAMBANGAN SKALA BESAR

Hendra Try Ardianto

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro

Email: htardianto@live.undip.ac.id

Abstrak

“Pembangunan dari luar” yang ditawarkan dalam skala besar tidak selalu bisa membantu masyarakat pedesaan untuk lebih sejahtera. Pasalnya, pembangunan dari luar sebagaimana dalam bentuk pendirian pabrik semen cukup beresiko karena mengandung beberapa bias. Adapun bias tersebut bisa berupa bias keruangan, bias kelompok sasaran, bias proyek, bias kawasan pertanian, bias diplomatis, dan bias profesional. Untuk itu, tulisan ini menekankan ide “pembangunan dari dalam” menjadi penting. Tulisan ini meneliti praktik pembangunan di Rembang dan Pati dalam kasus pendirian industri semen dengan melihat bagaimana bias pembangunan berlangsung dalam sebuah proyek skala besar. Penelitian ini dikerjakan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam pada 2017 dan 2018. Tulisan ini berargumen bahwa bias-bias pembangunan dapat mendatangkan resiko bergesernya tujuan pembangunan, yang semula untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa menjadi sekadar eksploitasi sumber daya alam di desa. Ini menegaskan bahwa inisiatif pembangunan dari dalam menjadi penting untuk dipertimbangkan.

Kata Kunci:

Bias Pembangunan, Desa, Industri Semen, Pembangunan

Abstract

"Development from outside" offered on a large scale cannot always help rural communities to be more prosperous because the development from the outside as in the form of the establishment of a cement industry is quite risky because it contains several biases. The bias can be in the form of spatial bias, target group bias, project bias, agricultural area bias, diplomatic bias, and professional bias. For this reason, this paper emphasizes the idea of "development from within" becoming important. This paper examines development practices in Rembang and Pati in the case of the establishment of the cement industry by looking at how biased development takes place in a large-scale project. This research was carried out through direct observation and in-depth interviews in 2017 and 2018. This paper argues that biased development can bring the risk of shifting development goals, which were originally intended to improve the welfare of rural communities into exploitation of natural resources in the village. This confirms that internal development initiatives are important to consider.

Keywords:

Cement-Industry, Development, Development Biases, Rural

Pendahuluan

Bisakah pembangunan desa pada masyarakat agraris dilakukan dengan cara mendatangkan korporasi pertambangan skala besar? Ini adalah pertanyaan awal yang cukup penting untuk dicari jawabannya. Sebab, memaksakan hadirnya tambang di tengah kehidupan masyarakat desa tanpa melalui perhitungan yang cermat, bukan saja efek kesejahteraan yang tidak didapatkan, tetapi juga bisa menciptakan pemiskinan dan kemiskinan di tingkat desa. Hal ini terkonfirmasi dari riset-riset terdahulu yang dilakukan para ahli terkait dengan fenomena kutukan sumber daya alam.¹

Meskipun sudah banyak fakta yang mengonfirmasi keberadaan kutukan sumber daya alam, tetapi masih banyak negara yang mengafirmasi sektor pertambangan sebagai jalan pembangunan, tidak terkecuali Indonesia. Kutukan sumber daya alam terjadi karena negara yang kaya akan sumber daya alam (mineral) justru gagal memperoleh manfaat maksimal karena kerasnya perebutan didalamnya, menghasilkan korupsi, konflik dan tatakelola pemerintahan yang tidak baik (tidak akuntabel dan transparan). Walau eksploitasi alam seringkali menghasilkan kutukan, tidak sedikit negara yang tetap memilih jalan tambang untuk menjalankan roda pembangunan. Hasilnya, tidak kurang bukti kerusakan hutan, kehancuran kawasan pegunungan, dan tercemarnya sungai-sungai di Indonesia akibat ulah perusahaan besar yang tidak bertanggung jawab.² Ditambah juga berbagai catatan konflik dan bencana akibat industri ekstraktif yang menggusur kehidupan masyarakat.³ Adanya kenyataan semacam itu ternyata tidak

¹ Ide utama tentang kutukan sumber daya alam (*resource curse*) adalah keberlimpahan sumber daya alam cenderung menghasilkan dampak pembangunan yang negatif, seperti kinerja ekonomi yang buruk, macetnya pertumbuhan ekonomi, merebaknya korupsi, pemerintahan yang tidak efektif dan konflik kekerasan akibat situasi ekonomi-politik yang selalu bergejolak. Lihat Richard M. Auty, *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis* (New York: Routledge, 2003); Lihat juga Thomas M. Power, *Digging to Development? A Historical Look at Mining and Economic Development* (Boston: Oxfam America, 2002); Lihat juga Jeffrey D. Sachs dan Andrew M. Warner, "Natural Resource Abundance and Economic Growth" dalam *Center for International Development and Harvard Institute for International Development* (1997) dan juga "Natural Resources and Economic Development The Curse of Natural Resources" dalam *European Economic Review* Vol.45 No.4-6 (2001), h.827-38.

² Lihat George Junus Aditjondro, *Kebobongan-Kebobongan Negara: Perihal Kondisi Objektif Lingkungan Hidup Di Nusantara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003a) dan *Korban-Korban Pembangunan: Tilikan Terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan Di Tanah Air* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003b).

³ Lihat Bosman Batubara, "Defisit Pengetahuan Global Menghadapi *Man-Made Disaster* dan Implikasinya Bagi Warga di Negara Berkembang" dalam Heru Prasetya dan Bosman Batubara (Eds.) *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusabaan, dan Masyarakat Sipil* (Depok: Desantara, 2010), h.1-29; Lihat juga Siti Maimunah, *Negara Tambang Dan Masyarakat Adat: Perspektif HAM Dalam Pengelolaan Pertambangan Yang Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal* (Malang: Intrans, 2012); Lihat juga Chalid Muhammad dan Siti Maimunah (eds). *Tambang Dan Penghancuran Lingkungan: Kasus-Kasus Pertambangan Di Indonesia 2003-2004* (Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2006); Lihat juga Chalid Muhammad, Siti Maimunah, dan Aminuddin Kirom (eds).

pernah mengubah pola kebijakan pertambangan yang dilakukan pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah pusat maupun daerah ternyata tetap menjadikan sektor pertambangan sebagai pilihan jalan pembangunan selama di daerah itu terdapat potensi pertambangan. Hal ini sangat terlihat jelas jika kita mencermati kasus rencana pertambangan semen di Rembang dan Pati sejak 2007 hingga sekarang. Sudah lebih dari satu dekade ini, rencana pertambangan semen skala besar –PT Sahabat Mulia Sakti di Pati dan PT Semen Indonesia di Pati lalu ke Rembang– mendapat penolakan keras dari warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Di sisi lain, pemerintah terus mengupayakan agar rencana pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan tambang skala besar bisa tetap terealisasikan.

Kasus rencana pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang dan pabrik PT Sahabat Mulia Sakti (anak perusahaan PT Indocement) di Pati menunjukkan secara jelas kengototan pemerintah dan korporasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam atas nama pembangunan. Lihat saja, ketika warga berhasil menggagalkan upaya PT Semen Indonesia (dulu namanya PT Semen Gresik) untuk mendirikan pabrik semen di Pati, tidak berselang lama PT Semen Indonesia sudah mengantongi izin serupa di Rembang. Adapun di Pati sendiri, di waktu hampir bersamaan setelah gagalnya pertambangan semen PT Semen Gresik, izin eksploitasi baru untuk PT Sahabat Mulia Sakti dikeluarkan.

Kengototan pemerintah dalam mengeluarkan izin-izin tambang ini perlu sekiranya mendapat perhatian serius. Untuk itu, kasus ini –rencana pertambangan semen di Pati dan Rembang– menarik untuk diteliti lebih lanjut. Bagaimanapun juga, pertambangan skala besar bukanlah sesuatu yang ada dari dalam masyarakat desa itu sendiri. Jika itu bukan dari dalam masyarakat, apa titik lemah yang kemudian hadir dalam proyek pembangunan semacam itu? Adapun yang tidak kalah pentingnya, bagaimanakah pendekatan pembangunan yang lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri? Beberapa pertanyaan inilah yang akan dielaborasi lebih jauh dalam tulisan ini.

Tambang dan Kemiskinan: Catatan Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003 (Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2005).

Tetapi sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita melihat narasi pembangunan di Indonesia saat ini. Beberapa akademisi menyebutkan bahwa istilah pembangunan saat ini dianggap telah kehilangan reputasi. Tidak lain karena citra pembangunan yang ada sekarang seringkali bersanding dengan gambaran otoritarianisme Orde Baru di bawah kendali rezim Soeharto.⁴ Penyebab utama kegagalan pembangunan yang diusung Orde Baru terletak pada penekanan yang berlebihan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan semata.⁵ Akibatnya, efek pembangunan yang dimotori Orde baru pada akhirnya hanya menghasilkan sistem sosial dan politik yang rapuh dan memicu terjadinya pergolakan sosial-politik yang hebat.⁶ Hampir sebagian besar evaluasi pembangunan Indonesia di masa rezim Soeharto menunjukkan kesimpulan serupa.

Seiring dengan keruntuhan Orde Baru, dunia global sedang tumbuh narasi besar tentang *good governance* yang dimotori oleh Bank Dunia. Kegagalan pembangunan sebagaimana diusung Orde Baru kemudian dicap sebagai *bad governance*, bahwa sumber kegagalan pembangunan adalah karena tata kelola pemerintahan yang buruk. Dari sini kemudian muncul pendekatan-pendekatan baru pembangunan yang lebih responsif terhadap keterlibatan berbagai aktor, tidak hanya pemerintah, tetapi juga korporasi dan masyarakat itu sendiri.

Sejak itu, pendekatan pembangunan pasca Orde Baru mengalami pergeseran. Adanya desentralisasi peran pembangunan yang tidak selalu dikontrol oleh pemerintah pusat, menjadikan berbagai proyek pembangunan melibatkan peran banyak pihak. Keluarnya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memasukkan komponen partisipatif dan *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan. Salah satu respon nyata adanya perencanaan pembangunan partisipatif itu, pada 2007 – 2014 muncul proyek pembangunan yang diberi nama “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Pedesaan”. Proyek pembangunan ini oleh banyak pihak

⁴ B. Herry Priyono, “Mencari Badan Publik: Refleksi Bagi Rehabilitasi Arti ‘Pembangunan’ dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol.8 No.2 (2004), h.110

⁵ Tadjudin Nur Effendi, “Strategi Pengembangan Masyarakat: Alternatif Pemikiran Reformatif” dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol.3 No.2 (1999), h.111.

⁶ Lambang Trijono, “Refleksi Tentang Kekerasan Pembangunan: Menuju Pembangunan Perspektif HAM” dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol.2 No.3 (1999), h.24.

disebutkan sebagai proyek pembangunan yang partisipatif dan berdampak positif bagi masyarakat.⁷

Tidak saja masyarakat yang dilibatkan dalam proyek pembangunan, korporasi juga dibebani tugas untuk melakukan pembangunan. Lahirnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menandai adanya peran penting korporasi dalam upaya mendukung pembangunan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi jawaban utama pihak korporasi dalam menjalankan peran pembangunan itu. Oleh beberapa ahli, CSR dikatakan telah mampu memberdayakan masyarakat dan membangun ekonomi yang mandiri.⁸

Meskipun banyak yang memberikan catatan positif mengenai pendekatan umum pembangunan pasca Orde Baru, tidak jarang juga yang memberikan evaluasi yang negatif. Adanya ruang keterlibatan yang luas ternyata tidak menggaransi partisipasi masyarakat tumbuh dengan aktif, bahkan masyarakat banyak yang pesimis apakah keterlibatan mereka memang benar-benar diakomodasi pemerintah.⁹ Tidak terkecuali dengan pembangunan yang dimotori melalui CSR, dalam banyak hal, program yang berkarakter *charity* ini tidak bisa menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.¹⁰

Pada titik ini, analisis tentang sukses gagalnya pembangunan pasca Orde Baru dilihat hanya dari sisi implementasi saja. Baik yang sukses maupun yang gagal, dianalisis hanya pada apakah data-data yang ditemukan sesuai dengan prosedur proyek pembangunan atau tidak. Jika proyek berhasil dikarenakan prosedur yang direncanakan telah sesuai dengan yang dipraktikkan. Sebaliknya, jika proyek gagal karena

⁷ Lihat Wahyu Hamidi, Jahrizal, dan Susi Susanti, "Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi" dalam *Jurnal Ekonomi* Vol.18 No.1 (2010), h.145–54; *Lihat juga* Yusbar Yusuf, Rita Yani Iyan, dan Edwin Saputra, "Implikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Dikecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Tahun 2007 - 2010" dalam *Jurnal Ekonomi* Vol.9 No.2 (2011).

⁸ Asa Ria Pranoto dan Dede Yusuf, "Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang Di Desa Sarijaya" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol.18 No.1 (2014), h.49.

⁹ Lihat Hendra Try Ardianto, "Pembentukan Struktur Negosiasi Kota Surakarta : Kritik Nalar 'Best Practices' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol.15 No.2, h.124–39; *Lihat juga* Ahmad Haryadi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu" dalam *Jurnal Katalogis* Vol.4 No.3 (2016), h.168–80.

¹⁰ Dwi Wulan Pujiriyani dan Oki Hajiansyah Wahab, "Kemandegan CSR Dan Kontribusinya Terhadap Perluasan Konflik Agraria Di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol.17 No.2 (2013), h.101–15.

pelaksanaanya tidak menaati tata aturan yang di tetapkan. Dari sini terlihat, kajian tentang pembangunan seakan terkungkung pada perdebatan seberapa jauh proses teknokratis-menejerial pembangunan saja. Tidak ada analisis yang benar-benar baru yang menawarkan perspektif yang berbeda, dan inilah ruang kosong yang ingin diisi oleh tulisan ini.

Tulisan ini tidak sedang berhasrat untuk menjustifikasi mana proyek pembangunan yang sukses atau gagal. Penulis lebih berusaha mendalami bagaimana berbagai kelemahan dalam proyek pembangunan bisa diidentifikasi selama prosesnya sedang berjalan. Dengan cara itu, kita akan mendapat banyak *feedback* tentang berbagai tantangan dalam menjalan proyek pembangunan. Secara bersama, kita bisa meraba-raba pendekatan yang seperti apa yang ideal untuk menutupi kelemahan yang selama ini muncul.

Pembangunan dari Dalam: Sebuah Kaca Mata Teoritik

Dalam melakukan analisis ini, penulis akan menggunakan pendekatan pembangunan desa dari dalam. Penulis memberikan pengertian pembangunan desa dari dalam sebagai sebuah pendekatan pembangunan desa yang menitikberatkan pada upaya untuk menjawab persoalan masyarakat yang mereka hadapi sehari-hari. Pendekatan ini bukan berarti mengesampingkan peran pihak dari luar masyarakat desa, tetapi titik tekannya adalah apakah proyek pembangunan yang akan digalakkan berusaha memperbaiki kondisi masyarakat desa dengan solusi yang akrab dengan keseharian mereka, bukan sesuatu yang tidak dikenali sebelumnya. Artinya, dimensi lokalitas yang melekat dalam masyarakat menjadi titik acuan bagaimana proyek pembangunan digalakkan.

Pembangunan yang didektekan dari luar, tanpa mendasarkan basis pengetahuan masyarakat desa, sepenuhnya tidak akan peduli dengan kebutuhan dari masyarakat lokal tersebut.¹¹ Seringnya proyek pembangunan yang digagas pemerintah mengalami kegagalan karena cenderung menafikan pengetahuan lokal atau kearifan masyarakat

¹¹ David W Gegeo, "Indigenous Knowledge and Empowerment : Rural Development Examined from Within" dalam *The Contemporary Pacific* Vol.10 No.2 (1998), h.289.

setempat.¹² Untuk itu, dalam proyek pembangunan tidak bisa lagi hanya sekadar menempatkan masyarakat sebagai objek saja. Penduduk desa harus menjadi subjek yang terlibat dalam semua jenjang proyek pembangunan, dari perumusan, penyusunan, pelaksanaan, bahkan sampai evaluasi.¹³ Singkatnya, keterlibatan penduduk dalam proyek pembangunan desa harus dari tahap awal sampai tahap akhir.

Pendekatan pembangunan desa dari dalam harus mendasarkan pada kemampuan penduduk desa sendiri untuk mengembangkan dan menjawab kebutuhan mereka. Hanya mengandalkan para teknokrat atau profesional pembangunan yang berbekal kunjungan singkat, bukan turun langsung ke bawah, tentu akan menciptakan banyak sekali bias yang dikemudian hari menjadi penyebab kegagalan proyek pembangunan. Di sini, Chambers mengenalkan perangkat analisis untuk memahami bias (prasangka) yang seringkali muncul dalam proyek pembangunan, diantaranya: bias keruangan, bias proyek, bias orang, bias musim, bias diplomatis, dan bias profesional.¹⁴ Keenam perangkat analisis yang dikenalkan Chambers ini bisa menjadi cara untuk melihat seberapa jauh sebuah proyek pembangunan mengindap bias-bias yang bermasalah didalamnya.

Jika proyek pembangunan didedikasikan untuk mengentaskan kemiskinan, maka harus dipahami secara benar apa yang menjadikan mereka terperangkap dalam jerat kemiskinan. “Orang luar” (teknokrat atau konsultan pembangunan) tidak bisa serta merta merumuskan penyebab kemiskinan hanya dengan pijakan asumsi teoritis, tanpa mau terjun langsung dalam keseharian orang-orang miskin. Tidak hanya itu, pahami juga bagaimana strategi orang-orang miskin ini menghadapi kondisinya. Kesalahan fatal “orang luar” dalam melihat kemiskinan di desa biasanya terjadi karena orang-orang miskin dianggap tidak melakukan apapun untuk mengatasi persoalannya, sehingga harus ditolong segera dengan solusi-solusi yang cenderung sok tahu dan tidak pada tempatnya.

Oleh karena itu, agar tidak terperangkap dalam bias, maka proyek pembangunan harus sebisa mungkin menyelami secara mendalam bagaimana pengetahuan penduduk desa. Apa saja yang perlu dipahami dari pengetahuan penduduk desa, Robert Chambers

¹² Samsul Maarif, Asman Azis, dan Palupi Setiani, “Pembangunan Nasional : Kearifan Lokal Sebagai Sarana Dan Target Community Building Untuk Komunitas Ammatoa” dalam *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol.26 No.3 (2013), h.167–181.

¹³ Soetomo, “Menempatkan Masyarakat Pada Posisi Sentral Dalam Proses Pembangunan” dalam *Jurnal Sosial dan Politik* Vol.2 No.1 (1998), h.63–77.

¹⁴ Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (New York: Routledge, 2013), h.13-33.

dalam bukunya *Rural Development: Putting the Last First* telah memberikan penjabaran, diantaranya: praktek bercocok tanam, pengetahuan lingkungan hidup, kemampuan penduduk desa, dan kegiatan percobaan penduduk desa.¹⁵ Keempat hal ini harus dipahami sepenuhnya untuk melihat model proyek pembangunan yang cocok dan mampu menjawab kebutuhan warga desa.

Pertanggungjawaban Metode

Untuk memenuhi kerangka analisis di atas, penelitian ini mengandalkan pada metode penelitian kualitatif-deskriptif. Adapun fokus kasus yang diangkat adalah rencana pembangunan pabrik semen skala besar di Rembang dan Pati. Untuk mendapatkan data kualitatif tersebut, penulis menggunakan teknik penggalian data secara observasi partisan dan non-partisan. Observasi partisan dilakukan penulis secara pribadi pada medio 2014-2015 dengan cara tinggal langsung di desa Tegaldowo dan Timbrangan, Rembang. Sedangkan observasi non-partisan dilakukan secara bersama (tim) pada April-Juli 2018 dengan mendatangi penduduk desa di Rembang dan Pati.

Teknik penggalian data yang lain dilakukan dengan wawancara mendalam. Proses wawancara ini memiliki sebaran informan yang beragam, dari pejabat pemerintah lokal, baik eksekutif maupun legislatif (provinsi, kabupaten, desa) hingga penduduk setempat, baik yang menolak maupun mendukung proyek pembangunan pabrik semen. Pilihan untuk mewawancarai kedua belah pihak bertujuan untuk melakukan triangulasi sumber data. Sehingga proses penyusunan argumentasi dipilah dari data yang terverifikasi kebenarannya secara baik.

Enam Bias Dalam Rencana Pembangunan Pabrik Semen

Sebelum merumuskan pendekatan pembangunan dari dalam, mari kita lihat bagaimana titik lemah dari pembangunan dari luar itu sendiri. Bagaimanapun juga, proyek pembangunan desa melalui rencana pertambangan skala besar bukanlah proyek yang ada dari dalam masyarakat desa. Proyek itu didorong dari luar dengan cara mendatangkan sesuatu yang juga dari luar masyarakat. Dikatakan demikian karena proyek itu sebenarnya sudah bertentangan dengan profil masyarakat desa setempat. Ambil contoh Desa Tegaldowo –sebuah desa yang wilayahnya paling banyak dipakai

¹⁵ *Ibid*, h.82-91.

untuk rencana pertambangan PT Semen Indonesia–, di sini profil masyarakatnya 81% lebih bekerja di sektor pertanian.¹⁶ Tidak itu saja, area yang akan dijadikan pertambangan sebagian merupakan lahan pertanian produktif, terutama untuk tanaman jagung.

Belum lagi jika menggunakan logika bahwa pertambangan skala besar merupakan jenis usaha padat modal, dimana penggunaan teknologi lebih dominan dalam proses kerja sehari-hari daripada tenaga manusia. Artinya, jika pun akan menyerap tenaga kerja, tentunya mereka yang memiliki spesifikasi pendidikan tinggi, bukan masyarakat desa di sana yang masih rata-rata berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Dengan demikian, perlu sekiranya untuk memeriksa sejauh mana kelemahan-kelemahan dasar bisa diidentifikasi dalam proses rencana pertambangan skala besar ini.

Untuk menemukan titik lemah proyek pertambangan skala besar ini, penulis akan menggunakan konsep bias pembangunan yang diadaptasi dari pemikiran Chambers. Konsep bias atau prasangka dalam melihat pembangunan ini sebenarnya dipakai Chambers untuk menjelaskan kelemahan para peneliti dan petugas lapangan saat melihat berbagai persoalan kemiskinan yang ada di desa. Dalam tulisan ini, penulis melakukan adaptasi, bukan untuk melihat bias penelitinya, namun bias yang terjadi dalam seluruh rangkaian proses rencana pembangunan, entah itu yang berbentuk cara komunikasi, proses pelaksanaan kebijakan, maupun pernyataan-pernyataan kalangan teknokrat atau ilmuwan yang mendukung rencana pertambangan.

Pertama, bias keruangan. Bias ini hadir karena para peneliti atau petugas lapangan gagal melihat dimensi keruangan secara menyeluruh yang ada di dalam desa. Mereka hanya mendatangi ruang-ruang yang mudah dijangkau, biasanya tidak jauh dari jalan raya, terminal, atau wilayah pinggiran kota.¹⁷ Dalam konteks penelitian ini, bias keruangan terjadi pada para ilmuwan yang terlibat dalam penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (selanjutnya Amdal) PT Semen Indonesia di Rembang. Sebab, pernah suatu ketika pihak PT Semen Indonesia kehilangan muka karena dokumen

¹⁶ Jumlah penduduk Tegaldowo pada 2012 adalah 4.990 orang, dengan 4.056 orang diantaranya adalah bekerja di sektor pertanian. Data dikutip dari HT Ardianto, “Mengapa Saya Tidak Percaya Argumen Semen Dan Bersikap Menolak Semen Di Rembang” dalam Dwicipta dan Hendra Try Ardianto (eds). *#Rembang Melawan Membongkar Fantasi Pertambangan Semen Di Pegunungan Kendeng* (Yogyakarta: Literasi Press, 2015a).

¹⁷ Chambers. *Op.Cit.*, h.13-16.

Amdal yang telah disahkan pemerintah memuat deskripsi kondisi ekologis Pegunungan Kendeng di Rembang secara salah.

Dalam dokumen Amdal, disebutkan terdapat 9 gua dan 40 mata air, tanpa menyebutkan jumlah keberadaan ponor. Tidak hanya itu, dari data gua dan mata air tersebut, tidak ada satu pun yang posisinya berada di dalam area 540 hektar kawasan yang akan menjadi area penambangan.¹⁸ Sebaliknya, warga desa yang bekerjasama *Acintyacunyata Speleological Club (ASC)* dan *Semarang Caver Association (SCA)* menemukan kenyataan adanya kondisi lapangan yang jauh berbeda dari yang disebutkan di Amdal. Mereka ternyata menemukan keberadaan 64 gua dan 125 mata air; sebuah temuan yang jauh lebih besar daripada isi dokumen Amdal (Pelanggaran Hukum dan Manipulasi yang Dilakukan PT. Semen Indonesia di Rembang 2016). Tidak hanya itu saja, dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Semarang tanggal 5 Februari 2015, penulis mencatat adanya kesaksian dari warga yang menerangkan keberadaan 44 ponor, dan dari jumlah itu 22 ponor diantaranya berada persis di dalam kawasan yang akan ditambang.

Hal ini bisa terjadi karena proses penelitian untuk penyusunan Amdal mengidap bias keruangan. Adanya kontradiksi yang begitu besar soal fakta di lapangan menunjukkan bahwa para peneliti yang terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal menghindari kenyataan bahwa kawasan itu memiliki fungsi konservasi yang signifikan. Akibatnya, keberadaan gua, mata air, dan ponor tiba-tiba hilang begitu saja ketika posisinya berada di tengah-tengah area yang akan ditambang.

Kedua, bias proyek. Bias ini terjadi manakala para peneliti dan petugas lapangan hanya melihat tingkat kesuksesan pembangunan dari sisi proyek percontohan saja. Titik biasanya muncul karena orang-orang yang terlibat di dalam proyek percontohan itu sudah dilatih, diajari, dan diberitahu apa yang harus dijawab saat ditanya.¹⁹ Hal yang sama persis terjadi dalam kasus yang diangkat di tulisan ini. PT Semen Indonesia beberapa kali mengundang warga desa dan pejabat daerah Rembang untuk studi banding ke pabrik semen di Tuban. Sedangkan PT Sahabat Mulia Sakti juga melakukan

¹⁸ Akibat kejadian ini, pada perkembangannya luas Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang awalnya 540 hektar menyusut menjadi 293 hektar, sebab bukti adanya gua, mata air, dan ponor bisa dibuktikan secara valid oleh warga melalui foto-foto yang mereka ambil saat pemetaan kondisi kawasan yang akan ditambang. Lihat Hendra Try Ardianto, *Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan: Pertarungan Wacana Kesejahteraan Dalam Kebijakan Pertambangan* (Yogyakarta: Penerbit Polgov, 2016).

¹⁹ Chambers. *Op.Cit.*, h.16.

hal sama, mengajak warga dan pejabat daerah Pati berkunjung ke pabrik semen miliknya di Bogor. Tentu saja, warga desa dan para pejabat daerah ini akan ditunjukkan berbagai sisi keberhasilan dan manfaat dari adanya pabrik semen itu sendiri.

Dari wawancara dengan beberapa orang yang mengikuti kegiatan studi banding, mereka bercerita bahwa mereka diajak untuk melihat bagaimana teknologi industri semen, mulai dari teknologi penangkap debu hingga teknologi pemulihan area pasca tambang. Mereka juga dipertemukan kepada kelompok masyarakat yang dibina oleh perusahaan, mulai dari kelompok usaha kecil menengah (UKM) hingga kelompok masyarakat lainnya penerima manfaat dari program CSR. Kesimpulan dari studi banding itu tidak perlu tanyakan karena pasti menunjukkan bahwa keberadaan pabrik semen akan memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

Studi banding ini selalu mengidap bias proyek di dalamnya. Sebab, peserta studi banding tidak akan melihat kenyataan lain selain kisah sukses. Misalkan, mereka tidak akan dipertemukan dengan kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Pemuda Pengangguran Ring 1 (APPR1) yang berkali-kali menggelar demonstrasi pada PT Semen Indonesia di Tuban.²⁰ Para peserta ini juga tidak akan tahu bahwa jumlah pengangguran terus meningkat di area ring-1 pabrik semen di Tuban, bahkan data Bappeda Tuban terakhir menyebutkan adanya peningkatan pengangguran 200% di wilayah sekitar pabrik semen.²¹ Hal serupa juga sangat mungkin terjadi di balik kisah sukses yang ditampilkan PT Sahabat Mulia Sakti ketika studi banding ke pabriknya di Bogor.

Ketiga, bias orang. Bias ini bisa diartikan juga sebagai bias kelompok sasaran. Bias ini hadir jika para peneliti dan petugas pembangunan hanya menemui kelompok masyarakat tertentu, tanpa mempedulikan kelompok masyarakat yang lain. Kelompok yang ditemui ini biasanya menjadi pusat informasi yang utama, seperti para elit desa, kaum pria, dan mereka yang aktif. Sedangkan mereka yang bukan elit desa, perempuan,

²⁰ Khoirul Huda, "Pemuda Aliansi Pengangguran Ring I Semen Gresik Tuntut Dipekerjakan", <http://bloktuban.com/berita-read.php/?show=12667-pemuda-aliansi-pengangguran-ring-i-semen-gresik-tuntut-dipekerjakan.html> (Diakses 12 Agustus 2018).

²¹ Yudi Arianto dan Gunawan Wihandono, "Manajer Binling Semen Gresik Kaget Angka Kemiskinan Warga Ring 1 Naik 200 Persen", <https://www.bangsaonline.com/berita/45687/manajer-binling-semen-gresik-kaget-angka-kemiskinan-warga-ring-1-naik-200-persen> (Diakses 12 Agustus 2018).

atau mereka yang jarang aktif dalam kegiatan formal desa nyaris diabaikan begitu saja.²² Bias seperti ini ternyata juga penulis temukan dalam kasus di Rembang dan Pati.

Dalam wawancara dengan para elit desa, khususnya para perangkat desa, mereka selalu menyatakan adanya manfaat yang sangat banyak dari kehadiran perusahaan semen. Mereka mengaku telah mendapat banyak bantuan dari perusahaan, mulai dari pembangunan jalan, pembangunan masjid, kegiatan pemberdayaan, perbaikan sanitasi, bedah rumah, dan bantuan-bantuan lain seperti sembako. Tidak hanya perangkat desa saja, tetapi juga elit desa lain seperti guru dan tokoh agama di desa mengonfirmasi jawaban tersebut.

Hal ini berbeda ketika wawancara dilakukan dengan petani biasa, yang bukan perangkat desa. Mereka sebagian besar tidak bisa mendeskripsikan manfaat-manfaat semacam itu. Jauh berbeda lagi jika wawancara dilakukan dengan warga penolak tambang, mereka menyampaikan informasi yang sebaliknya, bukan manfaat yang didapat tetapi kerugian, seperti polusi udara, kerusakan lingkungan, bahkan banjir. Jika ditelisik lebih jauh, mereka yang bisa menyebutkan berbagai macam manfaat di atas, ternyata memiliki satu benang merah yang sama, yakni mereka mengakui kepada penulis bahwa dalam beberapa kesempatan pernah mengajukan proposal dan mendapat dana dari program CSR perusahaan semen. Terjadinya bias kelompok sasaran ini persis sebagaimana diilustrasikan secara bernas oleh Suwater, pemuda sekaligus petani Desa Tegaldowo, “Yang menerima manfaat itu ya perangkat-perangkat desa itu, kalau kita petani biasa ya Cuma dapat jajanan snack saja”.²³

Keempat, bias kawasan pertanian. Sebenarnya Chambers menyebutkan dengan istilah bias musim (kemarau), yakni bias yang muncul ketika para peneliti dan petugas pembangunan hanya mendatangi pedesaan saat musim kemarau karena di musim hujan kondisi wilayah desa cenderung sulit dijangkau.²⁴ Namun, penulis mengadaptasikan konsep ini sebagai bias kawasan pertanian, yang esensinya sama bahwa bias akan muncul ketika kawasan pertanian tidak dilihat pada waktu yang tepat. Sejak awal rencana pertambangan PT Semen Indonesia di Rembang, kuat sekali narasi tentang kawasan yang akan ditambang adalah kawasan kering, tandus, dan tidak produktif untuk

²² Chambers. *Op.Cit.*, h.18-19.

²³ Suwater, wawancara penulis pada tanggal 31 Maret 2018.

²⁴ Chambers. *Op.Cit.*, h.20-21.

pertanian. Narasi ini terus di sosialisasikan oleh pihak perusahaan dalam berbagai seminar.²⁵

Tidak saja pihak perusahaan, beberapa ilmuwan juga menguatkan narasi ini. Prof. Hermawan Sulisty, seorang peneliti senior di LIPI, di awal tahun 2017 sering mengeluarkan pernyataan yang mendukung narasi bahwa kawasan yang akan ditambang di Rembang adalah tandus dan tidak produktif.²⁶ Tidak hanya itu, narasi seperti ini bahkan pernah disampaikan langsung oleh salah satu warga desa sendiri. Dalam sebuah demonstrasi mendukung rencana pertambangan semen pada medio 2015, penulis menyaksikan warga Desa Tegaldowo menyampaikan orasi bahwa desanya memiliki tanah kapur yang tandus dan tidak cocok untuk pertanian. Keberadaan narasi semacam ini hadir akibat bias yang mengasumsikan tanah kapur adalah tanah yang tidak cocok untuk pertanian.

Bagaimana mungkin tanah di sana tidak cocok sebagai kawasan pertanian, apabila melihat kenyataan 81% warga Desa Tegaldowo adalah petani. Selain itu, baik di Pati dan Rembang yang masuk wilayah rencana pertambangan, ternyata ketika musim panen bisa menghasilkan produk pertanian yang melimpah. Penulis pernah secara langsung berada di Desa Tegaldowo saat musim panen raya. Penulis menyaksikan langsung satu keluarga bisa mendapatkan puluhan karung jagung saat panen. Hal ini juga dikonfirmasi dari liputan panjang yang ditulis seorang jurnalis dalam sebuah sub-judul “Tanah yang Subur itu Bernama Tegaldowo”.²⁷

Kelima, bias diplomatis. Bias ini maksudnya adalah keberjarakan yang muncul antara orang-orang desa dengan orang luar yang sedang meneliti atau bertugas. Biasanya orang-orang desa akan menyembunyikan keburukan yang ada didesanya jika ada pihak lain yang hendak menyelidik.²⁸ Dalam konteks penelitian ini, penulis

²⁵ “Topografi dan geografi Kecamatan Gunem dan Sluke dengan kandungan kapur yang tinggi, serta struktur tanah kering dan tadah hujan kurang cocok untuk pertanian dan perkebunan sehingga perlu kebijakan alih fungsi lahan ke arah industri pengolahan (misalnya, dengan pendirian pabrik semen)”. Kutipan ini adalah salah satu uraian yang pernah disampaikan Agung Wiharto, sekretaris PT Semen Indonesia pada 28 Mei 2015 dalam seminar di Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. *Libat* Hendra Try Ardianto, 2016. *Op.Cit.* h.70-71.

²⁶ Heru Triyono, “Ketua JMPPK Gunretno: Kami Tak Berharap Banyak Kepada Jokowi”, <https://beritagar.id/artikel/bincang/ketua-jmppk-gunretno-kami-tak-berharap-banyak-kepada-jokowi> (Diakses 13 Agustus 2018).

²⁷ Nurika Manan dan Quinawaty, “Tambang Semen Membelah Rembang (1)”, http://kbr.id/saga/04-2017/tambang_semen_membelah_rembang__1_/89528.html #Tanah_Subur_Itu_Bernama_Tegaldowo (Diakses 13 Agustus 2018).

²⁸ Chambers. *Op.Cit.*, h.22.

menemukan kenyataan bahwa pihak-pihak yang mendukung perusahaan semen akan cenderung mengerdilkan eksistensi warga yang menolak rencana pertambangan.

Beberapa kali wawancara dengan informan dari perangkat desa, penulis sering mendapat jawaban bahwa kelompok penolak pertambangan semen jumlahnya hanya segelintir orang saja. Kepala Desa Larangan di Pati, dalam wawancara dengan penulis, dirinya menyatakan bahwa di desanya hanya ada “beberapa orang saja” yang menolak pendirian pabrik semen. Padahal, hasil observasi lapangan yang dilakukan penulis bersama tim peneliti, Desa Larangan adalah desa yang jumlah warga penolak pabrik semennya paling besar dibanding desa-desa lain di Pati. Sebab, desa ini rencananya akan masuk area ring-1 sebagai area penambangan dan tapak pabrik dari PT Sahabat Mulia Sakti. Hal semacam itu juga sering ditemukan pada kesempatan wawancara dengan beberapa perangkat Desa Tegaldowo, bahwa jumlah warga penolak rencana pertambangan hanya tersisa beberapa orang saja, sisanya sudah menyatakan mendukung.

Bias ini akan semakin parah ketika dihadapkan pada pejabat yang lokasi tinggalnya di luar kawasan desa. Sebagaimana pernyataan informan yang merupakan pejabat pemerintah, “Masyarakat itu ada yang pintar ada yang bodoh, yang bodoh mudah diperalat dengan uang”. Pernyataan ini hendak mengatakan bahwa warga penolak rencana pertambangan di Rembang bertindak karena dibodohi dan ada pihak yang membiayainya. Padahal, hasil temuan penulis menunjukkan kenyataan sebaliknya, mereka yang mendukung pendirian pabrik semen rata-rata bergerak ketika perusahaan semen membagi-bagikan uang dan membiayai akomodasi untuk aksi demonstrasi mendukung rencana pertambangan. Sedangkan warga penolak lebih mengandalkan dana pribadi dari kantong masing-masing untuk membiayai kegiatan penolakan rencana pertambangan semen.

Keenam, bias profesional. Bias ini dijelaskan Chambers sebagai bias yang hadir akibat profesionalisme sempit yang mengarahkan proses penelaahan masalah menurut kapasitas keahliannya dengan melokalisir persoalan hanya pada bidang kajian yang digelutinya.²⁹ Bias ini menjadikan gambaran permasalahan di desa tidak pernah tuntas dan komprehensif, serta seringkali mengabaikan pandangan dari pihak penduduk desa

²⁹ Chambers. *Loc.It.*, h.22-23.

itu sendiri. Dalam konteks penelitian ini, bias semacam ini sering kali terjadi pada ilmuwan-ilmuwan yang disewa PT Semen Indonesia, baik untuk penyusunan dokumen Amdal maupun menjadi saksi ahli yang mendukung kepentingan perusahaan.

Terjadinya kekeliruan fatal dalam melihat posisi gua, mata air, dan ponor dalam dokumen Amdal sebagaimana disinggung sebelumnya, jelas akibat para ahli ini tidak melibatkan langsung masyarakat desa dalam proses penelitiannya. Mereka menggunakan tim survey dari universitas, kemudian tim dari universitas ini mengerahkan mahasiswa untuk memetakan posisi-posisi gua, mata air, dan ponor tersebut. Tim ahli ini percaya bahwa anak didiknya lebih memahami secara konseptual bagaimana memetakan lokasi di lapangan dibanding dengan harus melibatkan warga yang masih belum terlatih dalam metode pemetaan.

Contoh paling vulgar dari bias jenis ini terjadi pada akademisi yang menjadi saksi ahli yang didatangkan PT Semen Indonesia dalam sidang gugatan atas izin lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang. Eko Haryono, saksi ahli pertama, memberi tekanan bahwa wilayah yang akan ditambang bukan kawasan konservasi, karena masih tergolong karst muda. Sedangkan Heru Hendrayana, saksi ahli kedua, memberi kesaksian bahwa batu gamping di Rembang tidak mengandung air, jadi boleh ditambang.³⁰ Di belakang hari kedua kesaksian ini dianggap mengarahkan karena kedua orang tersebut terbukti tidak pernah melakukan penelitian di sana. Tidak hanya itu, kedua akademisi itu akhirnya dikenai sanksi administratif dari universitasnya karena dianggap menyalahi azas kelaziman sebagai saksi ahli.

Pembangunan Berbasis Pengetahuan Masyarakat

Jika pembangunan dari luar berupa proyek pertambangan skala besar mengidap banyak sekali bias di dalamnya, maka pendekatan pembangunan dari dalam yang seperti apa yang bisa dilakukan. Tulisan ini tidak akan memberikan jawaban pasti bagaimana pendekatan pembangunan dari dalam bisa dikerjakan. Namun, tulisan ini akan mengidentifikasi unsur-unsur elementer yang harus ada dalam pendekatan pembangunan dari dalam. Cara mengidentifikasi unsur dasar dari pendekatan pembangunan dari dalam adalah dengan melihat basis pengetahuan yang melekat dalam

³⁰ M. Zainal Arifin, "Pakar Hidrologi UGM Sebut Batu Gamping Di Rembang Tidak Mengandung Air", <http://jateng.tribunnews.com/2015/03/19/pakar-hidrologi-ugm-sebut-batu-gamping-di-rembang-tidak-mengandung-air> (Diakses 13 Agustus 2018).

kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Artinya, proyek pembangunan semestinya didedikasikan untuk mengembangkan segala potensi yang sudah dimiliki dari dalam masyarakat desa itu sendiri. Adapun hal yang dimiliki masyarakat desa adalah keseluruhan pengetahuan masyarakat desa, khususnya dalam memenuhi kesejahteraan mereka sehari-hari. Setidaknya, ada empat hal yang bisa dicermati dalam melihat basis pengetahuan masyarakat desa.³¹

Pertama adalah pengetahuan praktek bercocok tanam. Dalam observasi di lapangan yang dilakukan penulis, ternyata para petani di sana sudah memiliki pola bercocok tanam yang ajeg sesuai dengan kebutuhannya. Mereka tidak menami lahan pertaniannya hanya dengan satu jenis tanaman saja, tetapi beragam dan berganti. Maksud beragam adalah di satu lahan pertanian terdapat beberapa jenis tanaman, terutama tanaman pangan pokok dan palawija. Sedangkan maksud berganti adalah ketika musim hujan, padi menjadi prioritas untuk ditanam. Sebaliknya ketika kemarau petani akan menanam jagung atau ketela.

Pola bercocok tanaman yang beragam dan berganti ini memiliki tujuan yang spesifik. Hasil dari tanaman pangan pokok berupa padi nantinya akan disimpan dan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, jarang ada keluarga petani menjual hasil panen padi. Sedangkan palawija seperti kunyit, laos, jahe, talas, cabai dan lain-lain digunakan untuk kebutuhan memasak di rumah, tetapi ada kalanya dijual di pasar. Adapun untuk jagung, setelah dipanen para petani akan langsung menjualnya. Hal ini karena karakter jagung yang susah disimpan dalam jangka waktu lama. Jagung lebih mudah rusak dibandingkan dengan padi yang bisa bertahan lama jika masih dalam bentuk gabah.

Corak bercocok tanam ini sangat berkait erat dengan cara masyarakat desa dalam memenuhi kesejahtraannya. Tindakan tidak menjual padi adalah upaya dari keluarga petani untuk mencukupi kebutuhan pangannya selama satu tahun. Sedangkan untuk mendapatkan uang, mereka akan menjual produk lainnya seperti jagung dan palawija. Di beberapa bagian desa di Pati, bahkan ada pola ketika tanaman sudah memasuki masa tunggu panen, mereka akan bekerja di sektor lain, baik kerja di desa sendiri, desa lain, maupun luar kota, seperti jadi tukang, kuli, atau pedagang keliling. Di

³¹ Chambers. *Op.Cit.*, h.82-91.

sini terlihat, keberadaan lahan pertanian merupakan sentral kesejahteraan bagi kehidupan petani.

Adapun yang *kedua* adalah pengetahuan lingkungan hidup. Hasil observasi penulis di lapangan, pusat pengetahuan lingkungan hidup masyarakat desa yang diteliti terletak pada eksistensi air dan tanah. Mereka memiliki penghormatan yang besar pada kedua hal ini. Adanya penghormatan ini terlihat jelas dalam kegiatan *Sedekah Bumi*. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat desa akan mengekspresikan rasa syukur mereka atas hasil bumi yang telah didapatkan. *Sedekah bumi* adalah bagian dari ungkapan terima kasih mereka kepada Tuhan karena telah memberi kemakmuran bagi tanah (bumi) yang mereka garap dan tinggali selama ini.

Adapun yang dimaksud dengan bumi adalah tanah dan air itu sendiri. Dalam sedekah bumi, masyarakat desa akan mengumpulkan berbagai masakan dari hasil panennya dalam bentuk tumpeng yang beraneka ragam. Setiap keluarga akan menyumbang makanan tertentu, kemudian setelah terkumpul, mereka akan mengarak tumpeng tersebut keliling lingkungan desanya. Titik akhir dari prosesi ini adalah berdoa bersama di sumber mata air, dengan dipimpin oleh tokoh agama setempat. Pemimpin agama ini akan memanjatkan doa kepada Tuhan agar bumi yang mereka tempati selalu bisa mengalirkan air dan menumbuhkan tanaman yang melimpah.

Sedangkan yang *ketiga* adalah kemampuan penduduk desa. Jika menyimpan padi merupakan bagian dari cara mengamankan stok pangan bagi keluarga selama satu tahun, maka beternak adalah cara untuk membuat tabungan keluarga. Baik di Pati maupun Rembang, masyarakat di sekitar area rencana pertambangan adalah petani dan peternak sekaligus. Ada berbagai macam jenis hewan yang ditenak, mulai dari sapi, kambing, hingga unggas. Tujuan dari memelihara hewan ternak ini adalah membuat jaring pengaman apabila suatu saat membutuhkan dana dalam jumlah besar, misal melakukan renovasi rumah atau melangsungkan pesta pernikahan salah satu anggota keluarga.

Bagi keluarga petani, tidak memiliki hewan ternak memiliki resiko yang cukup serius. Utamanya jika keluarga itu tidak memiliki pekerjaan di luar usaha pertanian yang bisa memberi penghasilan tambahan. Tidak adanya hewan ternak yang dipelihara sama artinya dengan tidak adanya ketersediaan dana cadangan bagi kebutuhan mendadak yang suatu saat dibutuhkan, misalkan sakit dan memerlukan biaya rumah

sakit di kota. Keluarga petani yang tidak memiliki ternak berpotensi terjatuh pada hutang dengan rentenir. Para rentenir ini memberikan hutang dengan cara yang sangat mudah tetapi dengan bunga yang cukup tinggi. Di beberapa desa yang diteliti, keberadaan rentenir cukup banyak, biasanya para petani menyebutnya dengan istilah “Bank Tital”. Pemilik jasa “Bank Tital” ini adalah orang-orang kota. Jika keluarga petani terjatuh hutang pada rentenir dan tidak mampu membayarnya, maka menjual lahan pertanian miliknya adalah satu-satunya cara yang akan ditempuh.

Tidak hanya itu saja, relasi sosial antar tetangga juga merupakan bagian tidak terpisah dari kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Relasi sosial antar tetangga ini terus dipelihara secara kuat karena berperan untuk membagi beban persoalan (pekerjaan atau musibah) yang dihadapi masing-masing orang desa. Keluarga petani yang tidak memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak akan meminta tetangganya untuk membantu proses panen di lahan pertanian miliknya. Jika sudah dibantu, maka pada giliran lain berlaku relasi ganti membantu balik. Proses berbagi bantuan ini didasarkan pada relasi sukarela (*volunterism*), bukan relasi jual-beli atau dibayar dengan upah atas tenaga yang diberikan. Dalam kehidupan sehari-hari petani, mereka menyebut ini dengan istilah “sambatan” yang memiliki pengertian: berbagi keluhan hidup.

Terakhir atau *keempat* adalah kegiatan percobaan masyarakat desa. Cerita tentang percobaan masyarakat desa yang paling mudah ditemukan adalah penggunaan kotoran sapi sebagai pupuk kandang. Sebagaimana disinggung sebelumnya, hampir sebagian besar keluarga petani baik di Rembang dan Pati memiliki hewan ternak. Adapun kotoran hewan ternak yang terkumpul nantinya akan dibawa ke lahan pertanian untuk dijadikan pupuk kandang. Mereka menyadari, penggunaan pupuk kimia yang terus menerus akan merusak kesuburan tanah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, mereka mencoba memadukan dengan menambah kotoran ternak di lahan pertaniannya.

Percobaan masyarakat desa yang paling progresif sebenarnya dilakukan oleh kelompok masyarakat *Sadulur Sikep* (selanjutnya *Sikep*).³² Masyarakat Sikep sudah sejak lama melakukan usaha pertanian dengan menggunakan bahan-bahan dari alam.

³² *Sadulur Sikep* dikalangan masyarakat luas lebih dikenal dengan istilah *Samin*. Sebab, komunitas ini lahir dari gerakan yang diinisiasi oleh seorang bernama Samin Surosentiko (1859-1914) di masa kolonial. Namun, penyebutan Samin adalah istilah yang disematkan oleh peneliti atau pejabat pemerintah. Adapun istilah yang mereka akui di dalam komunitasnya sendiri adalah *Sikep*. Jadi, dalam tulisan ini, penulis menggunakan istilah *Sikep*, bukan Samin.

Beberapa keluarga Sikep bahkan telah mengembangkan teknik pembuatan pupuk alami, yakni memadukan antara kotoran dari dalam perut sapi dicampur dengan air tebu, tumbukan padi, dan ikan busuk.³³ Tidak hanya itu saja, penulis juga menyaksikan sendiri beberapa keluarga *Sikep* telah mengembangkan biogas untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Kemajuan yang dilakukan orang-orang *Sikep* terjadi tanpa ada campur tangan sama sekali dari pemerintah.

Keempat basis pengetahuan masyarakat desa inilah yang seharusnya menjadi landasan dalam merumuskan proyek pembangunan. Pendekatan pembangunan dari dalam harus memanfaatkan apa yang sudah ada dalam masyarakat sendiri, bukan dengan menawarkan solusi yang bahkan masyarakat sendiri tidak mengenalnya. Kegagalan proyek pembangunan seringkali terjadi karena proyek tersebut tidak pernah menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.³⁴ Artinya, jika memang proyek pembangunan didedikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka proyek pembangunan itu juga tidak boleh bertentangan dengan cara masyarakat desa memenuhi kesejahteraannya.

Penutup

Meski dinarasikan bahwa proyek pertambangan skala besar merupakan bagian dari kehendak untuk membangun, namun proyek ini memiliki titik lemah serius dalam banyak hal. Proyek ini sangat sulit diarahkan dalam upaya mendorong pembangunan khususnya bagi masyarakat desa. Sebab, dalam proses perjalanannya, rencana eksploitasi tambang baik di Rembang dan Pati mengidap banyak sekali bias yang sekaligus menjadi penanda potensi kegagalan mewujudkan misi pembangunan desa. Disebut memiliki potensi kegagalan karena bias yang muncul secara tidak langsung telah menggeser arah pembangunan menjadi tidak tepat sasaran (bukan untuk masyarakat desa lagi).

Bias keruangan muncul akibat pemetaan bentang alam seperti gua, mata air dan ponor yang salah diidentifikasi. Bias proyek hanya menunjukkan cerita sukses dan menutupi kisah pilu dari dampak pertambangan. Bias kelompok sasaran hadir ketika distribusi kesejahteraan yang dibagikan perusahaan tambang hanya menyentuh elit desa.

³³ Watchdoc, *Samin vs Semen*, https://www.youtube.com/watch?v=1fjuJ28WZ_Q (Diakses 13 Agustus 2018).

³⁴ Lihat Effendi 1999. *Op.Cit.*, dan Gegeo 1998. *Op.Cit.*

Bias kawasan pertanian muncul ketika para ilmuwan secara sembrono menyebutkan kawasan pertanian produktif sebagai kawasan kering, tandus dan tidak cocok untuk pertanian. Bias diplomatis lahir ketika para pejabat dan elit desa menderdikan suara warga yang menolak rencana pertambangan. Bias profesional terjadi ketika kelompok ahli (ilmuwan dan teknokrat) secara vulgar melacurkan diri hanya untuk memuluskan kepentingan perusahaan besar. Keenam bias ini hadir saling berkelidat satu sama lain. Dampaknya cukup signifikan, yakni rencana pertambangan kehilangan kepercayaan untuk mampu menggerakkan pembangunan desa dan menghadirkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Jika pertambangan skala besar dinilai tidak meyakinkan, maka proyek apa yang dinilai tepat untuk mendorong pembangunan desa. Tidak ada jawaban final yang ditawarkan tulisan ini, tetapi tulisan ini memberikan panduan yang bisa dipertimbangkan ketika merancang proyek pembangunan. Untuk membuat proyek pembangunan, maka pendekatan yang digunakan haruslah pendekatan pembangunan dari dalam. Maksudnya, rencana pembangunan yang akan digalakkan harus berdasar pada basis pengetahuan dari dalam masyarakat desa itu sendiri. Menawarkan solusi yang jauh dari basis pengetahuan masyarakat desa, sama artinya dengan menghabisi kemampuan masyarakat desa dalam memenuhi kesejahteraannya sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus. *Kebohongan-Kebohongan Negara: Perihal Kondisi Objektif Lingkungan Hidup Di Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- . *Korban-Korban Pembangunan: Tilikan Terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan Di Tanah Air*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ardianto, Hendra Try. “Mengapa Saya Tidak Percaya Argumen Semen Dan Bersikap Menolak Semen Di Rembang” dalam *#Rembang Melawan Membongkar Fantasi Pertambangan Semen Di Pegunungan Kendeng*, eds. Dwicipta and Hendra Try Ardianto (Yogyakarta: Literasi Press, 2015a), h.109–24.
- . "Pembentukan Struktur Negosiasi Kota Surakarta: Kritik Nalar ‘Best Practices’ Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol.15, No.2 (November 2015): h.124–39. <https://doi.org/10.22146/jsp.11389>
- . *Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan: Pertarungan Wacana Kesejahteraan*

Dalam Kebijakan Pertambangan. Yogyakarta: Penerbit Polgov, 2016.

- Arianto, Yudi, dan Gunawan Wihandono. “Manajer Binling Semen Gresik Kaget Angka Kemiskinan Warga Ring 1 Naik 200 Persen” dalam *Bangsaonline.com* (2018). <https://www.bangsaonline.com/berita/45687/manajer-binling-semen-gresik-kaget-angka-kemiskinan-warga-ring-1-naik-200-persen> (Diakses pada 12 Agustus 2018).
- Arifin, M. Zainal. “Pakar Hidrologi UGM Sebut Batu Gamping Di Rembang Tidak Mengandung Air” dalam *Jateng.Tribunnews.com* (2015). <http://jateng.tribunnews.com/2015/03/19/pakar-hidrologi-ugm-sebut-batu-gamping-di-rembang-tidak-mengandung-air> (Diakses pada 13 Agustus 2018).
- Auty, Richard M. *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*. New York: Routledge, 2003. <http://ideas.repec.org/a/eee/jrpoli/v20y1994i1p77-78.html> (Diakses pada 11 Agustus 2018).
- Batubara, Bosman. “Defisit Pengetahuan Global Menghadapi Man-Made Disaster Dan Implikasinya Bagi Warga Di Negara Berkembang” dalam *Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, Dan Masyarakat Sipil*, eds. Heru Prasetya and Bosman Batubara (Depok: Desantara, 2010). h.1–29.
- Chambers, Robert. *Rural Development: Putting the Last First*. New York: Routledge, 2013.
- Effendi, Tadjudin Nur. “Strategi Pengembangan Masyarakat: Alternatif Pemikiran Reformatif” dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.3, No.2 (November 1999): 109–24. <http://jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/124>.
- Gegeo, David W. “Indigenous Knowledge and Empowerment: Rural Development Examined from Within” dalam *The Contemporary Pacific*, Vol.10, No.2 (1998): h.289–315. <http://www.jstor.org/stable/23706891>.
- Hamidi, Wahyu, Jahrizal Jahrizal, dan Susi Susanti. “Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” dalam *Jurnal Ekonomi*, Vol.18 No.1(2010) : h.145–54. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/753/746>.
- Haryadi, Ahmad. “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu” dalam *Jurnal Katalogis* Vol.4, No.3 (2016): h.168–80. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6563/5239>.
- Huda, Khoirul. “Pemuda Aliansi Pengangguran Ring I Semen Gresik Tuntut Dipekerjakan” dalam *Bloktuban.com* (2017). <http://bloktuban.com/berita->

read.php/? show=12667-pemuda-aliansi-pengangguran-ring-i-semen-gresik-tuntut-dipekerjakan.html (Diakses pada 12 Agustus 2018).

- Maarif, Samsul, Asman Azis, and Palupi Setiani. "Pembangunan Nasional : Kearifan Lokal Sebagai Sarana Dan Target Community Building Untuk Komunitas Ammatoa" dalam *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol.26, No.3 (2013): h.167–181. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-mkp5e930c418cfull.pdf>.
- Maimunah, Siti. *Negara Tambang Dan Masyarakat Adat: Perspektif HAM Dalam Pengelolaan Pertambangan Yang Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal*. Malang: Intrans, 2012.
- Manan, Nurika, and Quinawaty. "Tambang Semen Membelah Rembang (1)." *Kbr.id* (2017). http://kbr.id/saga/04-2017/tambang_semen_membelah_rembang__1_/89528.html#Tanah_Subur_Itu_Bernama_Tegaldowo (Diakses pada 13 Agustus 2018).
- Muhammad, Chalid, dan Siti Maimunah, (eds). *Tambang Dan Penghancuran Lingkungan: Kasus-Kasus Pertambangan Di Indonesia 2003-2004*. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2006.
- Muhammad, Chalid, Siti Maimunah, and Aminuddin Kirom, (eds). *Tambang Dan Kemiskinan: Catatan Kecil Kasus Pertambangan Di Indonesia 2001-2003*. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2005.
- "Pelanggaran Hukum Dan Manipulasi Yang Dilakukan PT. Semen Indonesia Di Rembang" dalam *Jurnal Perempuan* (2016). <https://www.jurnalperempuan.org/berita/pelanggaran-hukum-dan-manipulasi-yang-dilakukan-pt-semen-indonesia-di-rembang> (Diakses pada 12 Agustus 2018).
- Power, Thomas Michael. *Digging to Development? A Historical Look at Mining and Economic Development*. Boston: Oxfam America, 2002). https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/OADigging_to_Development.pdf.
- Pranoto, Asa Ria, and Dede Yusuf. "Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang Di Desa Sarijaya" dalam *Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik* Vol.18, No.1 (2014): h.39–50. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/13094/9324>.
- Priyono, B. Herry. "Mencari Badan Publik: Refleksi Bagi Rehabilitasi Arti 'Pembangunan'" dalam *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* Vol.8, No.2 (2004): h.109–38. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11049>.
- Pujiriyani, Dwi Wulan, and Oki Hajiansyah Wahab. "Kemandegan CSR Dan Kontribusinya Terhadap Perluasan Konflik Agraria Di Kawasan Hutan Register

- 45 Mesuji” dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol.17, No.2 (2013): 101–15. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10877>.
- Sachs, Jeffrey D., dan Andrew M. Warner. “Natural Resource Abundance and Economic Growth” dalam *Center for International Development and Harvard Institute for International Development* (1997). <https://pdfs.semanticscholar.org/7b14/045909f42117197b82a910782ab68330a3e7.pdf>.
- . “Natural Resources and Economic Development The Curse of Natural Resources” dalam *European Economic Review* Vol.45, No.4–6 (2001): h.827–38. <http://www.earth.columbia.edu/sitefiles/file/about/director/pubs/EuroEconReview2001.pdf>.
- Soetomo, Soetomo. 1998. “Menempatkan Masyarakat Pada Posisi Sentral Dalam Proses Pembangunan” dalam *Jurnal Sosial dan Politik* Vol.2, No.1 (1998): h.63–77. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11159>.
- Suwater, wawancara penulis pada tanggal 31 Maret 2018.
- Trijono, Lambang. “Refleksi Tentang Kekerasan Pembangunan: Menuju Pembangunan Perspektif HAM” dalam *Jurnal Sosial dan Politik* Vol.2, No.3 (1999): h.23–47. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11147>.
- Triyono, Heru. “Ketua JMPPK Gunretno: Kami Tak Berharap Banyak Kepada Jokowi” dalam *Beritagar.id* (2017). <https://beritagar.id/artikel/bincang/ketua-jmppk-gunretno-kami-tak-berharap-banyak-kepada-jokowi> (Diakses pada 13 Agustus 2018).
- Watchdoc. *Samin vs Semen*. *Youtube.com* (2015). https://www.youtube.com/watch?v=1fJuJ28WZ_Q (Diakses pada 13 Agustus 2018).
- Yusuf, Yusbar, Rita Yani Iyan, dan Edwin Saputra. “Implikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Dikecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Tahun 2007 - 2010” dalam *Jurnal Ekonomi* Vol.9, No.2 (2011). <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/797/790>.